



## **Faktor–faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

*Nur Addila<sup>a</sup>, Mattoasi<sup>b</sup>, Lukman Pakaya<sup>c</sup>*

*<sup>a b c</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

*Email: addilah30@gmail.com<sup>a</sup>, Mattoasi@ung.ac.id<sup>b</sup>, Lukman.pakaya@ung.ac.id<sup>c</sup>*

---

### **INFO ARTIKEL**

#### **Riwayat Artikel:**

*Received: 9 Oktober 2024*

*Revised: 21 Oktober 2024*

*Accepted: 5 November 2024*

#### **Kata Kunci:**

*Kualitas Sumber Daya Manusia,  
Standar Akuntansi Pemerintah,  
Komitmen Organisasi,  
Teknologi Informasi,  
Komunikasi*

#### **Keywords:**

*Human Resources Quality,  
Government Accounting  
Standards, Organizational  
Commitment, Information  
Technology, Communication*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo yang mencakup kepala bidang, sekretaris, dan staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAP. Komitmen Organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP, teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi SAP, dan komunikasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi SAP. Secara simultan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAP.

### **ABSTRACT**

*The research aims to investigate the effect of human resource quality, organizational commitment, and information technology and communication on implementing accrual-based government accounting standards. The research utilizes a quantitative method, and the data collection technique uses a questionnaire. The analysis tool is multiple linear regression and the research samples are all employees of the Regional Disaster Management Agency of Gorontalo Province, comprising the heads of divisions, secretaries, and staff. The results of the research show that human resource quality has a positive and significant effect on the implementation of government accounting standards, and organizational commitment has a positive but insignificant effect on the implementation of government accounting standards. Moreover, information technology has a positive but insignificant effect on the implementation of government accounting standards. Lastly, communication has a positive but insignificant effect on implementing government accounting standards. Simultaneously,*

---

*human resource quality, organizational commitment, information technology, and communication signiticanta affect the implementation of government accounting standards.*

**@2024 Nur Addila, Mattoasi, Lukman Pakaya  
Under License CC BY-SA 4.0**

## **PENDAHULUAN**

Perubahan pengelolaan keuangan Negara terus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta penuh keadilan dan ketaatan. Sebagai bentuk jawaban atas bergesernya paradigma masyarakat saat ini mendorong pemerintah memberikan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. (Aninditia, Y. (2018).

Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang informasinya memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, disajikan tepat waktu, dan lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pengguna mengambil keputusan yang lebih berkualitas. Laporan keuangan yang andal adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan di dalam laporan keuangan, dapat diuji lebih dari satu kali dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan dengan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan mudah dipahami adalah laporan keuangan yang dapat dipahami dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya. (Ardianto, R., & Eforis, C. (2019).

Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tertera pada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan terkait penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya. (Ardianto, R., & Eforis, C. (2019).

Pernyataan 01 SAP menyatakan penyajian laporan keuangan harus disajikan secara terstruktur dan juga informasi harus diidentifikasi secara jelas. Penerapan 01 SAP membuat laporan keuangan dapat dibandingkan dan mudah dipahami, sehingga semakin baik penerapan SAP membuat kualitas laporan keuangan menjadi meningkat. Suwita dan Arnan (2015), Sudirianti dkk (2015), dan Ichlas dkk (2014) telah membuktikan bahwa tingginya penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan tersebut laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap harus menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam LKPD harus sesuai dengan SAP yang telah berlaku yakni sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa LKPD yang telah dibuat oleh pemerintah dengan memberika opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Terdapat empat macam opini yang diberikan oleh BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Setelah BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD maka laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang telah dilaporkan sudah disajikan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang terdapat pada PP No.71 Tahun 2010

Adanya peraturan pemerintah yang baru maka pemerintah diwajibkan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran menjadi lebih berkualitas karena dalam implementasi basis akrual banyak kelebihan yang didapatkan yakni dapat menunjukkan gambaran pendapatan, dapat disajikan sebagai tolak ukur modal, penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional akan memiliki relasi dengan penerimaan dan pemasukannya serta mencerminkan pengeluaran yang lebih objektif, aktual dan rill sehingga dapat menjelaskan kineja yang sesungguhnya, karena dengan menggunakan basis akrual tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dengan baik. Keefektifan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan pemerintah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik dari pada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Tengku, 2015).

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan

keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluruhan budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. (Suhardjo, Y. (2019:5)

### **Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintahan disebut juga dengan akuntansi sektor publik. Secara organisasi akuntansi domain publik meliputi Pemerintah, BUMN/BUMD, Universitas, Yayasan, dan Organisasi nirlaba lainnya. Menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik yaitu alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Halim (2012:3) akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua**

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010.

### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2014:306) memberi pengertian yaitu: "Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan

sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi”.

### **Teknologi Informasi**

Dizaman serba digital saat ini, teknologi informasi merupakan hal terpenting. Teknologi informasi salah satu alat bantu yang harus ada dalam mendukung setiap aktivitas organisasi, tidak terkecuali dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi, William dan Sawyer dalam Haryanto (2012).

### **Komunikasi**

Teknologi Komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lain. Teknologi komunikasi ditekankan pada sebagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan dan disampaikan ke tempat tujuan sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh.

### **Perumusan Hipotesis**

H<sub>1</sub>: Sumber Daya Manusia Berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

H<sub>2</sub> : Komitmen Organisasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

H<sub>3</sub> : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

H<sub>4</sub> : Komunikasi berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

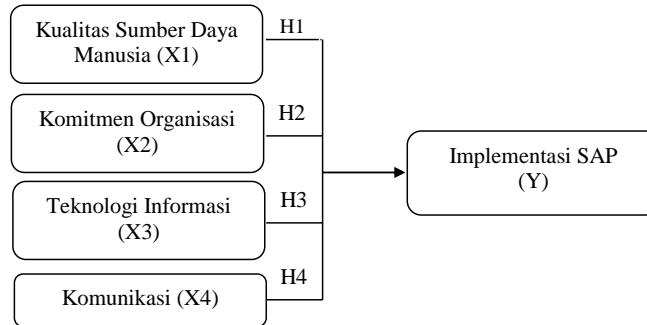
H<sub>5</sub> : Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen (bebas) yaitu yaitu sumber daya manusia (X1), komitmen organisasi (X2), teknologi informasi (X3), dan komunikasi (X4), serta terdapat 1 variabel dependen (terikat) yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Y). Penelitian ini terdiri dari beberapa langkah untuk melakukan teknik analisis data, diantaranya adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan persamaan regresi linear berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f serta uji koefisien determinasi.

Adapun desain penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:



**ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
HASIL PENELITIAN**

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**1. Hasil Uji Normalitas Data**

Tabel 4. 1 Tabel Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70844080
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.064
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.811
Asymp. Sig. (2-tailed)		.526

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,811 dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,526 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Tabel 4. 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

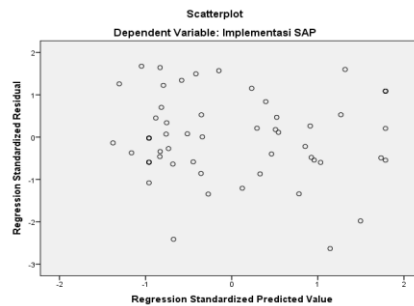
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Kualitas SDM	.422	2.369
Komitmen Organisasi	.194	5.152
Teknologi Informasi	.272	3.680
Komunikasi	.332	3.016

Berdasarkan hasil analisis pada table diatas, terlihat diperoleh untuk nilai VIF

untuk variable Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) sebesar 2,369 dengan nilai tolerance 0,422, Komitmen Organisasi (X2) nilai VIF sebesar 5,152 dengan nilai tolerance 0,194, Teknologi Informasi (X3) nilai VIF sebesar 3,680 dengan nilai tolerance 0,272, dan Komunikasi (X4) nilai VIF sebesar 3,016 dengan nilai tolerance 0,332 yang berarti Nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut dibawah angka 10 seperti yang disyaratkan dan nilai tolerance yang diperoleh untuk masing-masing variable tidak kurang dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable-variabel independent dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 3. Hasil Uji Autokorelasi

#### Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, diperoleh titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.306	1.237		1.864	.068
1 Kualitas SDM	.155	.055	.386	2.809	.007
Komitmen Organisasi	.069	.080	.175	.863	.392
Teknologi Informasi	.059	.066	.152	.886	.380
Komunikasi	.113	.147	.119	.768	.445

a. Dependent Variable: Implementasi SAP

Berdasarkan hasil analisis diatas, model regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 2,306 + 0,155X1 + 0,069X2 + 0,059X3 + 0,113X4 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta sebesar 2,306 menunjukkan nilai rata-rata variable Implementasi SAP dengan ketentuan nilai variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi bernilai konstan atau ceteris paribus.
- b) Nilai Koefisien Regresi Variabel X1 (Kualitas Sumber Daya Manusia) sebesar 0,155 atau sebesar 15,5% menunjukkan setiap perubahan peningkatan pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Implementasi SAP sebesar 15,5%.
- c) Nilai Koefisien Regresi Variabel X2 (Komitmen Organisasi) sebesar 0,069 atau sebesar 6,9% menunjukkan setiap terjadi peningkatan pada variabel Komitmen Organisasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Implementasi SAP sebesar 6,9%.
- d) Nilai Koefisien Regresi Variabel X3 (Teknologi Informasi) sebesar 0,059 atau sebesar 5,9% menunjukkan setiap terjadi peningkatan pada variabel Teknologi Informasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Implementasi SAP sebesar 5,9%.
- e) Nilai Koefisien Regresi Variabel X4 (Komunikasi) sebesar 0,113 atau sebesar 11,3% menunjukkan setiap terjadi peningkatan pada variabel Komunikasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Implementasi SAP sebesar 11,3%.

## 2. Hasil Pengujian Parameter Individual (Uji-t)

Tabel 4. 1 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.306	1.237		1.864	.068
1 Kualitas SDM	.155	.055	.386	2.809	.007
Komitmen Organisasi	.069	.080	.175	.863	.392
Teknologi Informasi	.059	.066	.152	.886	.380
Komunikasi	.113	.147	.119	.768	.445

a. Dependent Variable: Implementasi SAP

Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

### Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung 2,809 > t-tabel 2,004 dan nilai signifikansi 0,007 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). (H1 diterima)

- a) Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t$ -hitung  $0,863 < t$ -tabel  $2,004$  dan nilai signifikansi  $0,392 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). (H2 ditolak).

b) Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t$ -hitung  $0,886 < t$ -tabel  $2,004$  dan nilai signifikansi  $0,380 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). (H3 ditolak).

c) Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi SAP

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t$ -hitung  $0,768 < t$ -tabel  $2,004$  dan nilai signifikansi  $0,445 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi (X4) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). (H4 ditolak).

### 3. Hasil Uji Parameter Simultan (Uji-F)

Tabel 4. 1 Hasil Uji Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	220.984	4	55.246	17.645	.000 <sup>b</sup>
Residual	172.207	55	3.131		
Total	393.192	59			

a. Dependent Variable: Implementasi SAP

b. Predictors: (Constant), Komunikasi, Kualitas SDM, Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai  $F$ -hitung penelitian ini sebesar  $17,645$ . Sedangkan nilai  $F$ -tabel pada tingkat signifikansi  $5\%$  dan derajat bebas pembilang ( $df_1$ ) sebesar  $K$  (Jumlah variabel bebas)  $= 4$  dan derajat bebas penyebut ( $df_2$ ) sebesar  $n - k - 1 = 60 - 4 - 1 = 55$  adalah sebesar  $2,54$ . Jika kedua nilai  $F$  ini dibandingkan, maka nilai  $F$ -hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari  $F$ -tabel sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikansi, yakni nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian  $0,000$  yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$   $0,05$ . Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAP (Y).

#### 4. Koefisien Determinasi

Tabel 4. 1 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.750 <sup>a</sup>	.562	.530		1.76948

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Kualitas SDM, Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi

b. Dependent Variable: Implementasi SAP

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.18 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,530 atau 53%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi mampu memprediksi variabel Implementasi SAP sebesar 53%, sedangkan sisanya yaitu 47% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.

#### PEMBAHASAN

##### Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung 2,809 > t-tabel 2,004 dan nilai signifikansi 0,007 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). Meskipun menunjukkan hasil yang positif dan signifikan akan tetapi masih terdapat nilai yang terkecil sebesar 4,27 untuk variabel kualitas sumber daya manusia. Nilai tersebut adalah cara sumber daya manusia memperoleh informasi terkait implementasi SAP berbasis akrual masih kurang, artinya organisasi ini belum memberikan akses informasi yang cukup memadai untuk sumber daya manusia yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Handayani (2018) yang meneliti mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yang artinya sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mengimplementasikan SAP. Perangkat pendukung berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yang artinya semakin memadainya perangkat pendukung yang ada pada bagian keuangan SKPD, maka Implementasi SAP Berbasis Akrual pun akan semakin baik. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang artinya semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi pula Tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pahala, I., & Utamingtyas, T. H. (2023) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemeritahan. Demikian juga

penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum, I., & Arifin, A. (2017) kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan pegawai yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi, tidak semua yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi sehingga pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih diperlukan untuk mendukung penerapannya berjalan baik dan pengalaman kerja juga membuat kemahiran dalam pekerjaannya.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung  $0,863 < t\text{-tabel } 2,004$  dan nilai signifikansi  $0,392 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). Meskipun hasil dari penelitian ini berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Artinya masih terdapat nilai yang terkecil pada variabel X2 yaitu tentang pemberian insentif dan penghargaan dari organisasi untuk tim dan individu sebesar 4,27. Rendahnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa pemberian insentif ataupun penghargaan belum sepenuhnya dilakukan oleh organisasi, padahal hal tersebut sangat berguna untuk memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang besar kepada organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution, Erlina, dan Sari (2016) menyatakan bahwa komitmen sangat berperan untuk memperkuat tercapainya suatu keberhasilan. Dengan adanya komitmen yang baik akan meningkatkan SDM, sarana pendukung, dan insentif sehingga lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang dalam hal ini adalah implementasi SAP berbasis akrual. Demikian juga Marsdenia dan Arthaingan (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum, I., & Arifin, A. (2017) mengatakan bahwa komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Menunjukkan penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya. Dan Fitrizal, R. (2017) juga menyatakan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

### **Pengaruh teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung  $0,886 < t\text{-tabel } 2,004$  dan nilai signifikansi  $0,380 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). Tidak signifikannya bisa di artikan bahwa meskipun memiliki pengaruh yang positif tetapi masih terdapat kendala yang terjadi dalam proses implementasi SAP

seperti terbatasnya sarana prasana teknologi informasi yang berkualitas. Kendala sering terjadi yaitu gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan proses penginputan data ke sistem yang digunakan (SIMDA/KASDA) menjadi terhambat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh keuangan (Satrio et al., 2016) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah. Teknologi informasi digunakan sebagai metode untuk menyajikan informasi yang berkualitas tinggi, relevan, efektif dan efisien, yang digunakan baik untuk keperluan individu, perusahaan maupun pemerintah dan merupakan informasi strategis dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi memanfaatkan sekumpulan komputer untuk proses pengolahan data, sistem jaringan menghubungkan antar komputer sesuai kepentingan, dan menggunakan teknologi telekomunikasi agar informasi dapat disebarluaskan dan diakses dalam skala global. Teknologi informasi akan sangat berkontribusi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, banyaknya jumlah transaksi jika dilakukan secara manual akan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi yang tepat akan mendukung pemerintah dalam memproses transaksi keuangan dengan efektif dan efisien dalam penyusunan laporan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrizal (2017) yang menyebutkan bahwa teknologi informasi saling bekerjasama dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan di instansi publik. Ketersediaan software, hardware, dan jaringan internet yang memadai ternyata sangat membantu karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Ketersediaan software akuntansi sangat menunjang pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan secara efektif dan efisien. Ketersediaan jaringan internet yang memadai juga memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dan pengumpulan data. Hal ini dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan sangat membantu penerapan SAP dengan basis akrual secara optimal.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitarini et al., 2017) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Teknologi informasi yang baik seperti komputer yang memadai, koneksi internet yang baik, komputerisasi BMN, adanya perangkat lunak yang mendukung dan pemeliharaan komputer yang berada dikantor pengelolaan BMN tidak menjamin keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Hal tersebut berlaku sebaliknya dengan kondisi teknologi informasi yang kurang baik di kantor pengelola BMN. Penyediaan penyediaan perangkat keras komputer yang mendukung pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak cukup mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah akrual pada pengelolaan BMN. Kondisi demikian perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah mengingat investasi di bidang teknologi informasi khususnya perangkat keras dapat menjadi sia-sia tanpa memperoleh manfaat dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk pengelolaan BMN. Dan begitupun Iznillah, M. L., Azlina, N., & Silfi, A. (2015) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

### **Pengaruh komunikasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t$ -hitung  $0,768 < t$ -tabel  $2,004$  dan nilai signifikansi  $0,445 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi (X4) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP (Y). Menunjukkan berarti masih kurang efektifnya komunikasi pimpinan terhadap bawahannya dalam sosialisasi penerapan SAP yang disampaikan ke pegawainya. Selain itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik oleh pimpinan kepada pegawainya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Z. N., Azlina, N., & Rofika, R. (2023) Komunikasi berpengaruh terhadap SAP. Komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting karena dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat berperan dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah. Diperlukan komunikasi yang baik agar kewenangan yang diamanatkan mudah untuk dipahami oleh pihak pemerintah daerah. Selain pemerintah pusat dan daerah, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh atasan dan para pegawai agar pekerjaan yang diberikan dalam proses implementasi SIPD dapat diselesaikan dengan baik sesuai tujuannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015) Komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan SKPD dalam mensosialisasikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum, I., & Arifin, A. (2017) yang mengatakan bahwa komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menunjukkan berarti masih kurang efektifnya komunikasi pimpinan terhadap bawahannya dalam sosialisasi penerapan SAP yang disampaikan ke pegawainya. Dan begitupun Iznillah, M. L., Azlina, N., & Silfi, A. (2015) menyatakan bahwa Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Artinya Tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir tidak memiliki pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

### **Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai  $F$ -hitung penelitian ini sebesar  $17,645$ . Sedangkan nilai  $F$ -tabel pada tingkat signifikansi  $5\%$  dan derajat bebas pembilang ( $df_1$ ) sebesar  $K$  (Jumlah variabel bebas) =  $4$  dan derajat bebas penyebut ( $df_2$ ) sebesar  $n - k - 1 = 60 - 4 - 1 = 55$  adalah sebesar  $2,54$ . Jika kedua nilai  $F$  ini dibandingkan, maka nilai  $F$ -hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari  $F$ -tabel sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_5$

diterima. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikansi, yakni nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAP (Y).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAP. Komitmen Organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Implementasi SAP, teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi SAP, dan komunikasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi SAP. Secara simultan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAP.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran ataupun rekomendasi sebagai berikut:

- a) Bagi BPBD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pegawai dalam peningkatan proses implementasi SAP berbasis akrual. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pemberian insentif dan juga penghargaan kepada para pegawai, serta diharapkan untuk lebih memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap kendala yang masih sering terjadi seperti koneksi internet yang sering eror.
- b) Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini hanya meninjau implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Attar, D., & Ikhsan, M. (2020). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(2), 171-179.
- Arih, Tyas Ninditha. dkk. 2017. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mem-pengaruhi Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kota Bandung*” (*Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 17 –No. 1 April 2017). Universitas Telkom.BandungAsri, Fadhillah. 2015 .“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual” (*Jom. FEKON Vol.2 No.1 Februari 2015*).

Universitas Riau Pekanbaru

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95-136.
- Aninditia, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (*Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Dewi.Purnawati.Herawati. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrua pada SKPD Kabupaten Bangli. *Journal S1 Ak.Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S.Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017*.
- Evicahyani, Sagung Inten dan Nyoman Djinar Setiawan. 2016. “ nalisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan”. *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana, Denpasar: Udayana*.
- Fitrizal, R. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Iznillah, M. L., Azlina, N., & Silfi, A. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
- Laksono, Luthfi Masir Puji. 2016. *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Profesionalisme Aparat Terhadap Kesiapan Penerapan PP 71. Revisi 2011 (Studi Empiris Penerapan PP 71 Kota Malang Provinsi Jawa Timur)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Marsdenia, M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua: Sebuah Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Bogor. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2), 5.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214-223.

- Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbud Ristek. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 446-469.
- Purwaningrum, I., & Arifin, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 14-32.
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akruaI pada pengelolaan barang milik negara. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141-149.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.
- Putri, Audi Norma Sari. 2016. Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Kuesioner penelitian. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Pujanira, Putriasri dan Abdullah Taman. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi Vol. 6, No. 2 Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*
- Pratiwi, Annisa Intan, Sri Rahayu dan Djusnimar Zutilisna. 2017. Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Komunikasi terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2015). *EProceeding of Management. Bandung: Telkom University.*
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus Pemerintah Kota Semarang). *Solusi*, 17(4).
- Safitri, Devi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi. Pekanbaru: Universitas Riau.*
- Sari, Fenty Herlina, dkk. 2016. Motivasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Denpasar: Universitas Udayana*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.